

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta (Bastian, 2010 : 3). Anggaran sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan, dalam satuan moneter. Menurut Bastian (2010 : 202) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi.

Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau *item line budget*. Cara penyusunan anggaran tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak di periksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010 : 80) ciri-ciri pendekatan tradisional ini adalah : (1) disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi sehingga bentuknya terlihat seperti pos-pos belanja suatu organisasi. (2) bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. (3) umumnya bersifat inkremental.

Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal yaitu: Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang akan dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan

perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Jadi, tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan, untuk itu diperlukan penganggaran partisipatif serta kompetensi yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintah.

Menurut Garrison dalam Hinduan (2006:408) mendefinisikan anggaran partisipatif adalah anggaran yang disisipkan dengan kerjasama serta partisipasi penuh dari manajer pada semua tingkatan. Dalam struktur pemerintah daerah para manajer dan kepala daerah biasa disebut perangkat daerah yaitu sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Salah satu bentuk penyusunan anggaran adalah penganggaran partisipatif, dimana anggaran partisipatif adalah suatu proses penyusunan anggaran yang melibatkan para manajer menengah dan bawah dalam suatu organisasi. Keterlibatan para manajer menengah dan bawah dalam proses penyusunan anggaran akan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan anggaran. Dalam konteks pemerintahan maka keterlibatan dapat dilihat dari proses penyusunan program dan kegiatan yang disusulkan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan pemerintah. Sedangkan kompetensi menurut Rosidah (2003:11) adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam

pekerjaannya. Pegawai yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam bekerja maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan observasi awal pada Kecamatan Lubuk Raja serta fenomena yang terjadi dilapangan bahwa dalam kinerja keuangan penyelenggaraan dalam hal ini belum dapat dikatakan baik hal ini dikarenakan dalam melakukan anggaran masih terdapat beberapa pegawai belum dapat memberikan pendapatnya dalam setiap kegiatan anggaran di Kecamatan, dimana dalam konsep penganggaran partisipatif setiap pegawai berhak menyuarakan pendapatnya akan tetapi masih ada saja pegawai yang tidak dapat meyalurkan pendapatnya, hanya beberapa pegawai saja yang mampu menyampaikan pendapatnya seperti kepala dalam setiap bidang saja.

Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi terutama dalam kinerja keuangan suatu instansi pemerintah daerah tidak lepas dari faktor kompetensi yang dimiliki penyelenggara pemerintahnya. Berdasarkan hasil observasi bahwa kompetensi atau kemampuan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU masih lambat dalam mengambil tindakan setiap kebutuhan masyarakat seperti pada saat terdapat suatu desa yang jalannya rusak parah, dalam keadaan ini pemerintah tidak cepat tanggap mengeluarkan anggaran atau keuangan dalam melakukan pembenahan jalan. Pada saat ini kondisi ekonomi masyarakat dapat dikatakan dalam keadaan yang sulit, maka dari itu pemerintah pusat sering sekali melakukan penyaluran bantuan yang harus disampaikan langsung kepada masyarakat, akan tetapi dalam pemberian bantuan pemerintah

terkadang kurang tepat sasaran dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah untuk melihat langsung kelapangan terhadap kondisi masyarakat dan memilih langsung masyarakat yang tepat menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penganggaran Partisipatif dan Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Penganggaran Partisipatif dan Kompetensi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan?.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penganggaran Partisipatif dan Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai Penganggaran Partisipatif dan Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU mengenai Penganggaran Partisipatif dan Kompetensi Terhadap Kinerja Keuangan.